BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Realisasi Anggaran

2.1.1 Perancangan

Defenisi perancangan dalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi*, menjelaskan bahwa:

> Perancangan terdiri dari logis dan fisik. Perancangan logis adalah perancangan untuk melengkapi *eksternal level schema* dan menterjemahkan persyaratan data para pemakai dan program aplikasi ke dalam *conceptual level schema*. Perancangan fisik *(Physical Design)* adalahperancangan untuk mengubah hasil rancangan konsep ke dalam struktur penyimpanan fisik. (Krismiaji, 2005,h.144)

Definisi lain dalam bukunya yang berjudul *Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic dan SQL server*, menjelaskan bahwa: "perancangan sistem adalah proses pembangunan spesifikasi sistem baru berdasarkan hasil rekomendasi analis sistem." (Kusrini, 2007, h.79)

Berdasarkan definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa perancangan merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan sebuah sistem baru berdasarkan analisi sistem secara logis dan fisik.

2.1.2 Sistem

Definisi sistem dalam buku yang berjudul *Sistem Akuntansi*,menjelaskan bahwa:"sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan

lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.” (Mulyadi, 2008, h.2)

Definisi lain dari sistem dalam buku yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi*, menjelaskan bahwa:“suatu sistem dapat didefenisikan sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari dua atau lebih komponen atau subsistem yang berinteraksi untuk mencapau suatu tujuan.” (Rochaety Eti dan Faizal Ridwan, 2011, h.3)

Berdasarkan definisi-definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem adalah kumpulan/gabungan dari beberapa komponen sub-sub sistem yang membentuk suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.3 Informasi

Definisi Informasi dalam buku yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi*, menjelaskan bahwa: “informasi merupakan data yang telah diorganisasi, dan telah memiliki kegunaan dan manfaat.” (Krismiaji, 2010, h.15)

Definisi lain dari Informasi dalam buku yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi*, menjelaskan bahwa: “informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya.”(Jogiyanto, 2005, h.8)

Berdasarkan definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa informasi adalah kumpulan data yang telah diolah, dan mempunyai kegunaan dan manfaat bagi yang membutuhkannya.

2.1.4 Akuntansi

Definisi Akuntansi dalam buku yang berjudul Akuntansi Pemerintah bahwa "Akuntansi adalah proses mengenali, mengukur dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan." (Nordiawan Dedi dkk, 2007, h.1)
Definisi lain dari Akuntansi dalam buku yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* menjelaskan bahwa:

> Akuntansi adalah sebuah kegiatan jasa, fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam mengambil keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan nalar di antara berbagai alternative arah tindakan. Akuntansi terdiri atas beberapa cabang, di antaranya akuntansi keuangan manajemen dan pemerintah.(Halim Abdul, 2007:250)

Berdasarkan definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu keterampilan dalam mencatat, menggolong-golongkan dan meringkas transaksi-transaksi keuangan, serta melaporkan hasil-hasilnya dalam suatu laporan yang disebut sebagai laporan keuangan.

2.1.1 Sistem Informasi

Definisi sistem informasi menurut Robert A.Leitch dan K.Ros Davis yang dikutip dalam buku yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi*, sebagai berikut:

> Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung kegiatan operasi sehari-hari, bersifat manajerial dan kegiatan suatu organisasi dan menyediakan pihak-pihak tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan". (Puspitawati Lilis dan Sri Dewi Anggadini, 2011:14)

Definisi sistem informasi “Sistem informasi adalah kumpulan dari sub-sub sistem baik phisik yang saling berhubunga satu sama dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang berguna”. (Susanto Azhar, 2013:52)

Berdasarkan definisi-definisi diatas penulis dapat menyimpulkan sistem informasi adalah suatu sistem yang saling berhubungan secara harmonis yang mengolah data menjadi laporan-laporan yang berguna bagi penggunanya.

2.1.5Metode Pencatatan Akuntansi

Metode pencatatan akuntansi terdiri dari dua metode, yaitu *Accrual Basic dan Cash Basic.* Definisi *accrual basic* dan *cash basic*, menjelaskan bahwa:

> Accrual Basic Accounting adalah suatu metode akuntansi yang mencatat atau mengakui beban maupun pendapatan pada saat terjadi, yaitu beban dicatatnya pada saat barang-barang atau jasa diterima sedangkan pendapatan dicatat pada saat barang-barang atau jasa diserahkan tanpa menghiraukan saat pengeluaran maupun penerimaan dari yang bersangkutan.
>
> Cash Basic Accounting adalah suatu metode akuntansi dimana biaya/pendapatan dicatat saat di diterima/dibayar tanpa menghubungkan dengan periode untuk kapan biaya/pendapatan terjadi. Suatu sistem akuntansi dimana biaya pendapatan ditetapkan pada saat uangnya dibayar/diterima. (Ardiyos, 2005, h.19)

Definisi lain dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*, menjelaskan bahwa:

> Basis kas menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas, apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak dicatat. (Abdul Halim, 2007, h.40)

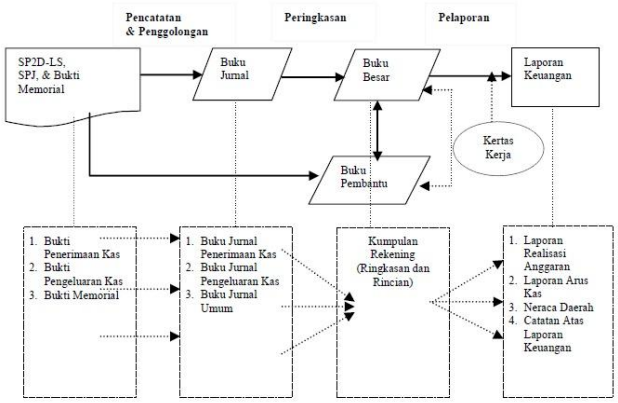
Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa metode pencatatan akuntansi yang digunakan pada BPPT Jawa Barat adalah *cash basic* dimana pengakuan biaya/pendapatan dicatat saat uang telah diterima.

2.1.6Proses Akuntansi

Definisi proses akuntansi dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*, menjelaskan bahwa:

> Sistem akuntansi menurut Kompmendagri No. 29 Tahun 2009 adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. (Abdul Halim, 2007, h.52)

Proses akuntansi apabila digambarkan akan tampak seperti berikut:



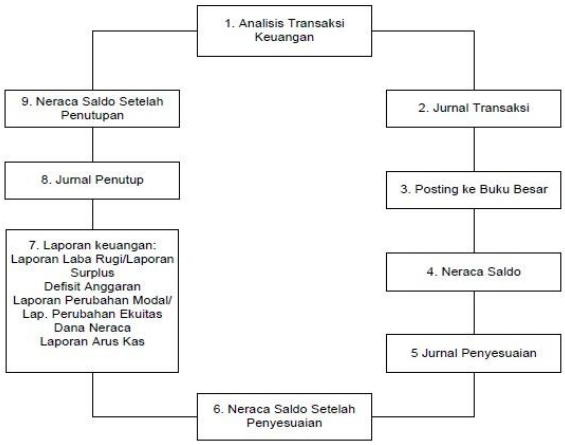
Gambar 2.1 Proses Akuntansi (Abdul Halim, 2007, h.52)

2.1.6.1Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Public Keauangan Daerah*, menjelaskan bahwa: “siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi”. (Abdul Halim, 2007, h.43)

Definisi lain dalam bukunya yang berjudul *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, mengatakan bahwa: “siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya dan pelaporan keuangan”. (Bastian, 2007, h.76)

Siklus Akuntansi dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.2 Siklus Akuntansi (Abdul Halim, 2007, h.43)

Siklus akuntansi dimulai dari Analisis transaksi keuangan, lalu proses pembuatan transaksi jurnal transaksi, lalu posting ke buku besar, sampai dihasilkan neraca saldo, lalu membuat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian dan berakhir di laporan kauangan neraca, laba rugi dan arus kas, membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah tutup buku.

2.1.6.2Jurnal Umum

Definisi jurnal umum dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Pemerintahan*, menjelaskan bahwa: “jurnal dilakukan untuk membukukan estimasi pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam APBD”. (Nordiawan, Sondi Putra dkk, 2007, h.269)

Definisi lain dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*, menjelaskan bahwa:

Jurnal adalah media untuk mencatat transaksi secara kronologis (berdasarkan urutan waktu terjadi transaksi), dalam proses jurnal menggantukan peran rekening/akun (*account*) dalam mencatat transaksi, tetapi merupakan sumber untuk pencatatan ke dalam rekening/akun. (Nur Afriah, 2010, h.11)

Tabel 2.1 Jurnal Umum (Nur Afiah, 2010, h.73)

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

JURNAL UMUM

SKPD :

Kode Organisasi :

Hal. .....

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit

Tabel 2.2 Jurnal Umum (Nur Afiah, 2010, h.74)

Pencatatan Transaksi Pengeluaran dan Pendapatan

PEMERINTAH KOTA BANDUNG

JURNAL UMUM

Tanggal	No Bukti	Kode Rekening	Uraian	Ref	Debit	Kredit
		1.1.1.01.01	Kas Bendahara Pengeluaran		xxx	-
		2.1.1.01.01	R/K Pusat		-	xxx
		5.1.1.01.01	Belanja Gaji		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas Bendahara Pengeluaran		-	xxx
		5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas Bendahara Pengeluaran		-	xxx
		5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas Bendahara Pengeluaran		-	xxx
		5.1.1.01.04	Tunjangan Beras		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas Bendahara Pengeluaran		-	xxx
		5.2.2.03.01	Belanja Telepon		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas Bendahara Pengeluaran		-	xxx
		5.2.2.03.02	Belanja Air		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas Bendahara Pengeluaran		-	xxx
		5.2.2.03.03	Belanja Listrik		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas Bendahara Pengeluaran		-	xxx
		5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas Bendahara Pengeluaran		-	xxx
		5.2.2.11.02	Belanja Makanan dan Minuman Harian Rapat		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas Bendahara Pengeluaran		-	xxx
		5.2.2.15.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas Bendahara Pengeluaran		-	xxx
		5.2.2.15.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas Bendahara Pengeluaran		-	xxx
Jumlah					xxx	xxx

Tabel 2.3 Jurnal Lanjutan 1 (Nur Afiah, 2010, h.75)

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
		6.2.2.2	Pembiayaan penerimaan dana cadangan		xxx	-
		1.1.1.01.02	Kas Bank		-	Xxx
		6.2.2.3	Pembiayaan Asuransi Karyawan		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas		-	Xxx
		6.2.2.4	Pembiayaan Bunga Pajak		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas		-	Xxx
		6.2.2.1	Pembiayaan pengeluaran		xxx	-
		6.2.2.2	Pembiayaan penerimaan dana cadangan		-	Xxx
		1.1.1.01.01	Kas		-	Xxx
		5 . 2 . 2 . 14 . 04	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas		-	Xxx
		5 . 2 . 2 . 15 . 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas		-	Xxx
		5 . 2 . 2 . 15 . 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas		-	Xxx
		5 . 2 . 2 . 20 . 03	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas		-	Xxx
		5 . 2 . 2 . 26 . 01	Belanja Kursus-kursus Singkat / Pelatihan		xxx	-
		1.1.1.01.01	Kas		-	Xxx
Jumlah					xxx	Xxx

Tabel 2.4 Jurnal Umum Lanjutan 2 (Nur Afriah, 2010, h.76)

Tanggal	No. Bukti	Kode Rekening	Keterangan	Ref	Debit	Kredit
		5. 2 .2. 27.02	Belanja Sosialisasi		Xxx	
		1.1.1.01.01	Kas			Xxx
		5 . 2 . 3 . 12 . 03	Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book		Xxx	
		1.1.1.01.01	Kas			Xxx
		5 . 2 . 3 . 12 . 04	Belanja Modal Pengadaan Printer		Xxx	
		1.1.1.01.01	Kas			Xxx
		5 . 2 . 3 . 16 . 01	Belanja Modal Pengadaan Kamera		Xxx	
		1.1.1.01.01	Kas			Xxx
		1.1.1.01.02	Kas Bank		Xxx	
		4.3.5.01.02	Penerimaan dana			Xxx
		1.1.1.01.01	Kas		Xxx	
		5.2.2.01.01	silpa			Xxx
Jumlah					Xxx	Xxx

2.1.6.3Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan

A. Penerimaan Pembiayaan

Definisi penerimaan pembiayaan dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*, Menjelaskan bahwa :

Penerimaan Pembiayaan adalah:

1. Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, yaitu penerimaan pembiayaan dicatat sebesar nilai brutonya (tidak dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima rekening kas daerah.
3. Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi penerimaan pembiayaan ini sebagai berikut:

Tabel 2.5 Dokumen Sumber Transaksi Penerimaan Pembiayaan (Nur Afiah 2010:101)

No	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber	Lampiran Dokumen Sumber
1	Pengisian dana cadangan	. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) . Perda Perintah Pencairan Dana (SP2D)	. SPD .SPM
2	Penyertaan modal pemerintah daerah	. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	. SPD . SPM
3	Pembayaran pokok pinjaman	. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	. SPD . SPM
4	Pemberiaan pinjaman daerah	. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	. SPD . SPM . Perjanjian pinjaman

4.Standar

5.Jurnal transaksi penerimaan pembiayaan

a. Penjualan transaksi penerimaan pembiayaan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD, secara harian berdasarkan urutan kronologis
b. Jurnal untuk transaksi penerimaan pembiayaan merupakan jurnal *corollary*, dimana satu jurnal akan berpengaruh terhadap laporan realisasi anggaran dan jurnal lainnya akan mempengaruhi neraca. (Nur Afiah, 2010, h.101)

Tabel 2.6 Standar jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan pembiayaan

(Nur Afiah, 2010:102)

No	Standar Jurnal	Debit	Kredit
1	Tidak Ada Jurnal	-	-
2	-	-	-
Untuk mencatat penggunaan SILPA			

B. Pengeluaran Pembiayaan

Definisi pengeluaran pembiayaan dalambukunya yang berjudul *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Menjelaskan Bahwa:* "pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah. (Nur Afiah, 2010, h.101)

Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar untuk mencatat transaksi pengeluaran pembiayaan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Dokumen sumber transaksi pengeluaran pembiayaan

(Nur Afiah, 2010, h.104)

No	Jenis Transaksi	Dokumen Sumber	Lampiran Dokumen Sumber
1	Pengisian dana cadangan	. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) . Perda Perintah Pencairan Dana (SP2D)	. SPD .SPM
2	Penyertaan modal pemerintah daerah	. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	. SPD . SPM
3	Pembayaran pokok pinjaman	. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	. SPD . SPM
4	Pemberiaan pinjaman daerah	. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)	. SPD . SPM . Perjanjian pinjaman

2.1.6.4 Buku Besar Umum

Definisi buku besar dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*, menjelaskan bahwa: "buku besar adalah buku yang berisi kumpulann rekening/akun/perkiraan (*account*), rekening-rekening yang digunakan untuk mencatat secara terpisah asset, kewajiban dan ekuitas dan, pendapatan, belanja dan pembiayaan". (Nur Afiah, 2010, h.11)

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa buku besar adalah kumpulan dari akun-akun atau perkiraan yang dicatat dalam jurnal.

Contoh buku besar umum yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8 Buku Besar Umum (Nur Arfiah, 2010, h.11)

Pemerintah Kota Bandung
Buku Besar Umum
Periode, xxx

SKPD :
Kode Organisasi :
Kode Rekening :
Nama Rekening :

Hal .....

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo

Tabel 2.9 Buku Besar Umum Kas Bendahara Pengeluaran

Pemerintah Kota Bandung
Buku Besar Umum
Periode, xxx

SKPD : Kecamatan Rancasari
Kode Organisasi : 1.20.32.01
Kode Rekening : 1.1.1.01.01
Nama Rekening : Kas Bendahara pengeluaran

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
	R/K Pusat	2.1.1.01.01	xxx	-	xxx
	Belanja Gaji Pokok	5.1.1.01.01	-	xxx	xxx
	Tunjangan Keluarga	5.1.1.01.02	-	xxx	xxx
	Tunjangan Jabatan	5.1.1.01.03	-	xxx	xxx
	Tunjangan Beras	5.1.1.01.04	-	xxx	xxx
	Belanja Telepon	5.1.1.03.01	-	xxx	xxx
	Belanja Air	5.1.1.03.02	-	xxx	xxx
	Belanja Listrik	5.1.1.03.03	-	xxx	xxx
	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	5.2.2.01.01	-	xxx	xxx
	Belanja Makan & Minuman Harian Rapat	5.1.1.11.01	-	xxx	xxx
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.1.1.15.01	-	xxx	xxx
	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	5.1.1.15.02	-	xxx	xxx

Tabel 2.10 Buku Besar Umum R/K Pusat

Pemerintah Kota Bandung
Buku Besar Umum
Periode, xxx

SKPD : Kecamatan Rancasari
Kode Organisasi : 1.20.32.01
Kode Rekening : 2.1.1.01.01
Nama Rekening : R/K Pusat

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
	Kas Bendahara pengeluaran	1.1.1.01.01	-	xxx	xxx

Tabel 2.11 Buku Besar Umum Belanja Gaji Pokok

Pemerintah Kota Bandung
Buku Besar Umum
Periode, xxx

SKPD : Kecamatan Rancasari
Kode Organisasi : 1.20.32.01
Kode Rekening : 5.1.1.01.01
Nama Rekening : Belanja Gaji Pokok

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
	Kas Bendahara pengeluaran	1.1.1.01.01	xxx	-	xxx

Tabel 2.12 Buku Besar Umum Tunjangan Keluarga

Pemerintah Kota Bandung
Buku Besar Umum
Periode, xxx

SKPD : Kecamatan Rancasari
Kode Organisasi : 1.20.32.01
Kode Rekening : 5.1.1.01.02
Nama Rekening : Tunjangan Keluarga

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
	Kas Bendahara pengeluaran	1.1.1.01.01	xxx	-	xxx

Tabel 2.13 Buku Besar Umum Tunjangan Jabatan

Pemerintah Kota Bandung
Buku Besar Umum
Periode, xxx

SKPD : Kecamatan Rancasari
Kode Organisasi : 1.20.32.01
Kode Rekening : 5.1.1.01.03
Nama Rekening : Tunjangan Jabatan

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
	Kas Bendahara pengeluaran	1.1.1.01.01	xxx	-	xxx

Tabel 2.14 Buku Besar Umum Tunjangan Beras

Pemerintah Kota Bandung
Buku Besar Umum
Periode, xxx

SKPD : Kecamatan Rancasari
Kode Organisasi : 1.20.32.01
Kode Rekening : 5.1.1.01.04
Nama Rekening : Tunjangan Beras

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
	Kas Bendahara pengeluaran	1.1.1.01.01	-	xxx	xxx

Tabel 2.15 Buku Besar Umum Belanja Telepon

Pemerintah Kota Bandung
Buku Besar Umum
Periode, xxx

SKPD : Kecamatan Rancasari
Kode Organisasi : 1.20.32.01
Kode Rekening : 5.2.2.03.01
Nama Rekening : Belanja Telepon

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
	Kas Bendahara pengeluaran	1.1.1.01.01	xxx	-	xxx

Tabel 2.16 Buku Besar Umum Belanja Air

Pemerintah Kota Bandung
Buku Besar Umum
Periode, xxx

SKPD : Kecamatan Rancasari
Kode Organisasi : 1.20.32.01
Kode Rekening : 5.2.2.03.02
Nama Rekening : Belanja Air

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
	Kas Bendahara pengeluaran	1.1.1.01.01	xxx	-	xxx

Tabel 2.17 Buku Besar Umum Belanja Listrik

Pemerintah Kota Bandung
Buku Besar Umum
Periode, xxx

SKPD : Kecamatan Rancasari
Kode Organisasi : 1.20.32.01
Kode Rekening : 5.2.2.03.03
Nama Rekening : Belanja Listrik

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
	Kas Bendahara pengeluaran	1.1.1.01.01	xxx	-	xxx

Tabel 2.18 Buku Besar Umum Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)

Pemerintah Kota Bandung
Buku Besar Umum
Periode, xxx

SKPD : Kecamatan Rancasari
Kode Organisasi : 1.20.32.01
Kode Rekening : 5.2.2.01.01
Nama Rekening : Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
	Kas Bendahara pengeluaran	1.1.1.01.01	xxx	-	xxx

Tabel 2.19 Buku Besar Umum Belanja Makanan dan Minuman Harian Rapat

Pemerintah Kota Bandung
Buku Besar Umum
Periode, xxx

SKPD : Kecamatan Rancasari
Kode Organisasi : 1.20.32.01
Kode Rekening : 5.2.2.11.02
Nama Rekening : Belanja Makanan dan Minuman Harian Rapat

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
	Kas Bendahara pengeluaran	1.1.1.01.01	xxx	-	xxx

Tabel 2.20 Buku Besar Umum Belanja Pemerintahan Dinas Dalam Daerah

Pemerintah Kota Bandung
Buku Besar Umum
Periode, xxx

SKPD : Kecamatan Rancasari
Kode Organisasi : 1.20.32.01
Kode Rekening : 5.2.2.15.01
Nama Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
	Kas Bendahara pengeluaran	1.1.1.01.01	xxx	-	xxx

Tabel 2.21 Buku Besar Umum Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pemerintah Kota Bandung
Buku Besar Umum
Periode, xxx

SKPD : Kecamatan Rancasari
Kode Organisasi : 1.20.32.01
Kode Rekening : 5.2.2.15.02
Nama Rekening : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
	Kas Bendahara pengeluaran	1.1.1.01.01	xxx	-	xxx

Tabel 2.22 Buku Besar Umum Pembiayaan Penerimaan Dana Cadangan

Pemerintah Kota Bandung
Buku Besar Umum
Periode, xxx

SKPD : Kecamatan Rancasari
Kode Organisasi : 1.20.30.22
Kode Rekening : 6.2.2.2
Nama Rekening : Pembiayaan Penerimaan Dana Cadangan

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
	Penambahan Dana	6.2.2.2	xxx	-	xxx

Tabel 2.23 Buku Besar Umum Pembiayaan Asuransi Karyawan

Pemerintah Kota Bandung
Buku Besar Umum
Periode, xxx

SKPD : Kecamatan Rancasari
Kode Organisasi : 1.20.30.22
Kode Rekening : 6.2.2. 4
Nama Rekening : Pembiayaan Asuransi Karyawan

Tgl	Uraian	Ref	Debit (Rp)	Kredit (Rp)	Saldo
	Biaya Asuransi	6.2.2.4	xxx	-	xxx

2.1.6.5 Laporan Realisasi Anggaran

Definisi laporan realisasi anggaran dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah,* menjelaskan bahwa:

> Laporan realisasi anggaran adalah menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. (Nur Afiah, 2010, h.166)

Definisi lain dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Pemerintahan* menjelaskan bahwa:

> Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sector public untuk menglokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas (*the process of allocating resources to unlimited demands),* pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. (Nordiwan, Sondi Putra dkk, 2007, h.14)

Berdasarkan definisi-definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa laporan realisasi anggaran adalah penyajian ikhtisar sumber, alokasi pemakaian sumber dana yang dikelola oleh pemerintah daerah dan dilakukan oleh organisasi sektor public untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya kedalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas.

Tabel 2.24 Laporan Realisasi Anggaran (Nur Afiah, 2010, h.196)

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ....
LAPORAN REAISASI ANGGARAN
Untuk Tahun Berakhir sampai dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	Realisasi 20X0
1	**Pendapatan**	xxx	xxx	xxx
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	xxx	xxx	xxx
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	xxx	xxx	xxx
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	xxx	xxx	xxx
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx
1.2	**Pendapatan Transfer**	xxx	xxx	xxx
1.2.1	**Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan**	xxx	xxx	xxx
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	xxx	xxx	xxx
1.2.2.3	Dana Alokasi Umum	xxx	xxx	xxx
1.2.2.4	Dana Alokasi Khusus	xxx	xxx	xxx
1.2.2	**Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**	xxx	xxx	xxx
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	xxx	xxx	xxx
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	xxx	xxx	xxx
1.3	**Transfer Pemerintah Provinsi**	xxx	xxx	xxx
1.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	xxx	xxx	xxx
1.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	xxx	xxx	xxx
1.4	**Lain-lain Pendapatan yang Sah**	xxx	xxx	xxx
1.4.1	Pendapatan Hibah	**xxx**	**xxx**	**xxx**
1.4.2	Pendapatan Dana Darurat	xxx	xxx	xxx
1.4.3	Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Pendapatan	xxx	xxx	xxx

Tabel 2.25 Laporan Realisasi Anggaran (Lanjutan 1) (Nur Afiah, 2010, h.167)

Nomor Urut	Uraian	Anggaran 20X1	Realisasi 20X1	Realisasi 20X0
2	**Belanja**	xxx	xxx	xxx
2.1	**Belanja Operasi**	xxx	xxx	xxx
2.1.1	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx	xxx
2.1.3	Bunga	xxx	xxx	xxx
2.1.4	Subsidi	xxx	xxx	xxx
2.1.5	Hibah	xxx	xxx	xxx
2.1.6	Bantuan Sosial	xxx	xxx	xxx
2.2	**Belanja Modal**	xxx	xxx	xxx
2.2.1	**Belanja Tanah**	xxx	xxx	xxx
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	xxx	xxx	xxx
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	xxx	xxx	xxx
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	xxx	xxx	xxx
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	xxx	xxx	xxx
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	xxx	xxx	xxx
2.3	**Belanja Tidak Terduga**	xxx	xxx	xxx
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	xxx	xxx	xxx
2.4	**Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa**	xxx	xxx	xxx
2.4.1	Bagi Hasil Retribusi	xxx	xxx	xxx
2.4.2	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota/Desa	xxx	xxx	xxx
	SURPLUS / (Defisit)	xxx	xxx	xxx
3	**Pembiayaan**	xxx	xxx	xxx
3.1	**Penerimaan Pembiayaan**	xxx	xxx	xxx
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	xxx	xxx	xxx
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	xxx	xxx
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	xxx	xxx	xxx
	Jumlah Penerimaan	xxx	xxx	xxx
3.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	xxx	xxx	xxx
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	xxx	xxx	xxx
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	xxx	xxx	xxx
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	xxx	xxx	xxx
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	XXX	XXX	XXX
	Jumlah Pengeluaran	xxx	xxx	xxx
	Pembiayaan Neto	xxx	xxx	xxx
3.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**	xxx	xxx	xxx

2.1.6.5.1Jenis dan Bentuk Anggaran

Jenis-jenis anggaran diterangkan dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Pemerintahan*, menjelaskan bahwa:

Jenis dan bentuk anggaran dibagi beberapa bagian, seperti:

A. Berdasarkan Jenis Aktiva
   1. Anggaran Operasional
   2. Anggaran Modal

B. Berdasarkan Status Hukum

C. Anggaran Dana dan Anggaran Khusus

D. Anggaran Tetap dan Anggaran Fleksibel

E. Berdasarkan Penyusunannya
   1. Eksekutifdan Legislatif. (Nordiawan, 2008, h.50)

2.1.7Sistem Akuntansi

Definisi sistem akuntansi dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Pemerintahan,* menjelaskan bahwa:

> Sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi dari komputer. (Nordiawan, Sondi Putra dkk, 2007, h.287)

Berdasarkan definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan adalah serangkaian prosedur pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2.1.8Sistem Informasi Akuntansi

Definisi dalam bukunya yang berjudul *Sistem Akuntansi*, menjelaskan bahwa: "sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu." (Mulyadi, 2008, h.2)

Definisi laindalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi*, menjelaskan bahwa: "sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang memproses data dan transaksi guna menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk merencanakan mengendalikan dan mengoperasikan bisnis." (Krismiaji, 2005, h.4)

Berdasarkan definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang mengolah lalu memproses

sebuah transaksi guna menghasilkan sebuah informasi yang bermanfaat yang digunakan sebagai pengambilan keputusan.

2.1.9Standar Akuntansi Realisasi Anggaran

2.1.9.1Standar Akuntansi Pemerintahan

Definisi standar akuntansi pemerintaham dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah*, menjelaskan bahwa:

> Standar akuntansi pemerintahan adalah masalah pengakuan suatu transaksi diakui untuk dicatat, masalah pengukuran menerapkan bagaimana nilai uang untuk dicatat dalam pos-pos laporan keuangan dan masalah pengungkapan (*disclosure*). (Nur Afiah, 2010, h.27)

2.1.9.2 Metode Pencatatan

A. Pembukuan Tunggal (*Single Entry)*

Definisi pembukuan tunggal dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah,* menjelaskan bahwa: "sistem pencatatan *single entry* disebut juga dengan *system* tata buku tunggal atau tata buku saja." (Nur Afiah, 2010, h.6)

B. Pembukuan Berpasangan (*Double Entry)*

Definisi pembukuan berpasangan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah,* menjelaskan bahwa: "pencatatan *double entry* juga sering disebut tata buku berpasangan. Pencatatan tersebut ada

sisi debit dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi." (Nur Afiah, 2010, h.6)

Persamaan dasar akuntansi yang dimaksud:

Aset = Kewajiban + Modal

Gambar 2.3 Persamaan dasar Akuntansi (Nur Afiah, 2010, h.6)

2.1.10 Sistem Informasi Akuntansi Realisasi Anggaran

Berdasarkan definisi-definisi diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi realisasi anggaran adalah perencanaan dan pembuatan sketsa yang didasari oleh peraturan dari beberapa elemen yang tepisah menjadi kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi untuk mengolah data yang dapat dimanfaatkan oleh pemakai dengan mengukur, mengidentifikasikan dan melaporkan informasi realisasi anggaran yang diterima dan dikeluarkan dibawah pengawasan pemerintah pusat untuk membiayai belanja-belanja ataupun mengenai kegiatan yang berhubungan dengan sektor publik.

2.1.10.1Fungsi Terkait

Fungsi terkait dalam bukunya yang berjudul *Sistem Akuntansi* adalah sebagai berikut:

Fungsi terkait dibagi menjadi 4 elemen, diantaranya:

A. Fungsi yang memerlukan pengeluaran
   Jika memerlukan pengeluaran kas, fungsi yang bersangkutan mengajukan permintaan untuk pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi.

B. Fungsi Kas
Sistem informasi akuntansi realisasi anggaran, fungsi ini bertanggungjawab atas pembayaran.

C. Fungsi Akuntansi
Fungsi Akuntansi bertugas mencatat Realisasi Anggaran yang menyangkut belanja anggaran, mencatat transaksi Realisasi Anggaran dalam jurnal realisasi anggaran dan membuat bukti kas masuk dankas keluaryang memberikan otorisasi kepada fungsi kas dalam mengeluarkan anggaran.

D. Fungsi Pemeriksaan Intern
Fungsi ini bertanggungjawab untuk melakukan perhitungan kas periodic dan mencocokan hasil perhitungan dengan saldo kas.“ (Mulyadi, 2008, h.21)

2.1.10.2Dokumen Yang Digunakan

Dokumen yang digunakan dalam bukunya yang berjudul *Sistem Akuntansi* adalah sebagai berikut:

Dokumen di bagi menjadi 3 elemen, diantaranya:

A. Bukti kas keluar
Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sebesar yang mencantumkan dalam dokumen tersebut.

B. Cek
Pada sudut system informasi akuntansi, cek merupakan dokumen yang digunakan untuk memerintahkan bank dalam melakukan pembayaran sejumlah uang kepada orang atau organisasi yang namanya tercantum pada cek tersebut.

C. Permintaan cek
Dokumen ini berfungsi sebagai permintaan dari fungsi yang memerlukan pengeluaran kas kepada fungsi akuntansi.” (Mulyadi, 2008, h.21)

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dokumen yang digunakan berhubungan langsung dengan Realisasi Anggaran adalah bukti kas masuk, bukti keluar, cek, permintaan cek yang saling berkaitan satu dengan lainnya. (Mulyadi, 2008, h.21)

2.1.10.3 Kebutuhan Rekayasa *Software* SIA Realisasi Anggaran

Definisi *Software* dalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Manajemen,* menjelaskan bahwa: "kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjelaskan aplikasi tertentu pada *computer*." (Susanto, 2007, h.166)

Software/aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat perancangan Sistem Informasi Akuntnasi Realisasi Anggaran, yaitu :

A. Microsoft Visual Basic

B. *Crystal Report*

C. MySQL Server

Software aplikasi yang penulis gunakan untuk membuat perancangan sistem informasi akuntansi realisasi anggaran adalah Microsoft Visual Basic, karena *software* ini merupakan salah satu Bahasa pemrograman yang cukup popular dan cenderung mudah dipelajari. Dan *Software* yang akan penulis hasilkan ialah program aplikasi Sistem Informasi Akuntansi Realisasi Anggaran.

Pembuatan *Software* ini juga membutuhkan *database* ialah tempat penyimpanan data dalam jumlah yang besar.*Database* dalam bukunya yang berjudul *Migrasi Microsoft SQL server*, menjelaskan bahwa: "*database* merupakan kumpulan dari beberapa data dalam jumlah yang banyak, saling berhubungan dan mempunyai arti tertentu." (Riyanto, 2005, h.2)

Membuat perancangan sistem informasi akuntansi realisasi anggaran penulis menggunakan *database* MySQL Server, karena dapat mendukung pengguna Bahasa SQL dan mempunyai kemampuan untuk mengakses *client server*.

Software aplikasi Microsoft Visual Basic dan MySQL Server sebagai *database*, penulis juga menggunakan *report* untuk hasil *output*. Penulis menggunakan *software* Crystal Report dalam pembuatan laporan perancangan sistem informasi akuntansi realisasi anggaran.

2.2Alat Pengembangan Sistem

2.2.1 Diagram Konteks

Definisi diagram konteks dalam bukunya yang berjudul *Analisis* dan *Desain Sistem Informasi,* menjelaskan bahwa: "diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem." (Bin Ladjamudin, 2005, h.64)

Definisi lain Definisi dalam buku yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi* menjelaskan bahwa "jenjang tertinggi disebut diagram konteks yang menggambarkan ikhtisar paling ringkas dari sebuah sistem." (Krismiaji, 2010, h.69)

Berdasarkan definisi-defiisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari satu proses dan menggambarkan alur ruang lingkup dari suatu sistem.

2.2.2 Diagram Arus Data (*Data Flow Diagram*/ DFD)

Definisi diagram arus data dalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi*, menjelaskan bahwa: "sebuah DFD secara grafis menjelaskan arus data dalam sebuah organisasi." (Krismiaji, 2005, h.68)

Definisi lain dalam bukunya yang berjudul *Analisis* dan *Desain Sistem Informasi,* menjelaskan bahwa: "diagram aliran data merupakan model dari sistem untuk menggambarkan pembagian sistem ke modul yang lebih kecil." (Bin Ladjamudin, 2005, h.64)

Berdasarkan definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa DFD adalah sebuah model sistem yang menjelaskan tentang alur suatu proses untuk menggambarkan pembagian sistem ke modul yang lebih kecil.

2.2.3 Bagan Alir (*Flowchart)*

Definisi bagan alir dalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi*, menjelaskan bahwa:

> Bagan alir (*flowchart*) merupakan teknik analitis yang digunakan untuk menjelaskan aspek-aspek sistem informasi secara jelas, tepat, dan logis.Bagan alir merupakan serangkaian simbol standar untuk menguraikan prosedur pengolahan transaksi yang digunakan oleh sebuah perusahaan, sekaligus menguraikan aliran data dalam sebuah sistem. (Krismiaji, 2005, h.71)

Definisi lain bukunya yang berjudul *Analisis & Desain*, menjelaskan bahwa: "bagan alir (*Flowchart)* adalah bagan (*Chart)* yang menunjukan alir (*Flow)* di dalam program atau prosedur system secara logika." (Jogiyanto, 2005, h.795)

Berdasarkan definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bagan alir (*Flowchart*) adalah suatu bagan yang berbentuk simbol dan menunjukan prosedur suatu sistem secara logika.

Bagan alir umum terdiri dari 3 macam, diantaranya:

Definisi bagan alir dalam bukunya yang berjudul *Analisis & Desain*, menjelaskan bahwa bagan alir *Flowchart* dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya:

Bagan Alir Sistem (*System Flowchart)*

Definisi menurut Jogiyanto (2005:796) dalam bukunya yang berjudul *Analisis & Desain*, menjelaskan bahwa: "bagan alir system merupakan bagan yang menunjukan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem." (Jogiyanto, 2005, h.795)

Definisi lain dalam bukunya yang berjudul *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansidengan Visual Basic & Microsoft SQL Server*, menjelaskan bahwa:

> Bagan alir sistem merupakan bagan yang menunjukan arus pekerjaan dari sistem secara keseluruhan, menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang ada di dalam system serta menunjukan apa yang dikerjakan di dalam sistem. (Kursini dkk, 2007, h.81)

Berdasarkan definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bagan alir sistem merupakan suatu bagan yang menunjukan alur dari sistem secara keseluruhan.

A. Bagan Alir Dokumen (*Document Flowchart)*

Definisi dalam bukunya yang berjudul *Analisis & Desain*, menjelaskan bahwa: "bagan alir dokumen atau disebut juga bagan alir formulir atau *paperwork flowchart* merupakan bagan alir yang menunjukan arus dari laporan dan formulir termasuk tembusan-tembusannya." (Jogiyanto, 2005, h.80)

Definisi lain dalam bukunya yang berjudul *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic & Microsoft SQL*

*Server,*menjelaskan bahwa: “bagan alir yang menunjukan arus laporan dan formulir, termasuk tembusan-tembusannya, menggunakan simbol-simbol yang sama dengan bagan alir sistem.” (Kusrini dkk, 2007, h.83)

Berdasarkan definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bagan alir dokumen adalah suatu bagan alir formulir atau kertas kerja yang menunjukan alur dari suatu dokumen.

B. Bagan Alir Skematik (*Schematic Flowchart*)

Definisi bagan alir skematik dalam bukunya yang berjudul *Analis & Desain*¸menjelaskan bahwa: “bagan alir sistematik merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir *system,* yaitu untuk menggambarkan prosedur di dalam sistem.” (Jogiyanto, 2005, h.802)

Definisi lain dalam bukunya yang berjudul *Tuntunan Praktis Membangun Sistem Informasi Akuntansi dengan Visual Basic & Microsoft SQL Server,* menjelaskan bahwa: “bagan alir sistematika menggambarkan prosedur di dalam system, merupakan bagan alir yang mirip dengan bagan alir sistem.” (Kursini, 2007, h.83)

Berdasarkan definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa bagan alir skematik adalah suatu bagan alir yang menggambarkan sebuah prosedur di dalam sistem.”

2.2.4 Kamus Data

Definisi kamus data dalam buku yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi* menjelaskan bahwa: "Kamus Data adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi (Jogiyanto, 2004:74)

Definisi lain kamus data dalm buku yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi,* menjelaskan bahwa: "kamus data sering disebut juga dengan sistem data dictionary adalah catalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi".(Al-Bahra, 2005:70)

Berdasarkan definisi-definisi menurut para ahli diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kamus data adalah keterangan dari pembuatan model sistem DFD *(Data Flow Diagram).*

Isi kamus data menurut Al-Bahra Bin Ladjamudin dalam bukunya yang berjudul *Analisis & Desain Sistem Informasi,* yaitu:

a. Nama Arus Data
b. Alias
c. Bentuk Data
d. Arus Data

Penjelasan.(Al-Bahra:2005:71)

2.2.5 Normalisasi

Definisi Normalisasi dalam bukunya yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi*,menjelaskan bahwa: "normalisasi adalah suatu proses memperbaiki/membangun dengan model data relasional, dan secara umum lebih tepat dikoneksikan dengan model dan logika."(Al-Bahra, 2005, h.169)

Definisi lain dalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi*,menjelaskan bahwa: "normalisasi adalah proses untuk mengorganisasikan file untuk menghilangkan grup elemen yang berulang-ulang."(Jogiyanto, 2005, h.403)

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan normalisasi adalah salah satu cara memperbaiki model data rasional, yang secara umum lebih tepat dikoneksikan sesuai model data secara logika.

Berikut merupakan tahapan normalisasi menurut (Al-Bahra,2005, h.169):

A. Bentuk tidak normal *(Unnormalized Form)*
   Bentuk ini merupakan kumpulan data yang akan direkam, tidak ada keharusan mengikuti format tertentu, dapat saja data tidak lengkap atau terduplikasi. Data dikumpulkan apa adaya sesuai dengan saat menginput.

B. Bentuk normal ke satu *(First Normal Form/*1NF*)*
   Pada tahap ini dilakukan penghilangan beberapa group elemen yang berulang agar menjadi satu harga tunggal yang berinteraksi diantara setiap baris pada suatu tabel dan setiap atribut harus mempunyai nilai data yang *atomatic*.(bersifat*automaticvalue*). Atom adalah zat terkecil yang masih memiliki sifat induknya, bila dipecah lagi maka ia tidak memiliki sifat induknya.

   Syarat normal kesatu (1-NF) yaitu:
   1. Setiap data dibentuk dalam flat file, data dibentuk dalam satu *record*demi satu *record* nilai dari *field* berupa "*automatic value*"
   2. Tidak ada *set attribute* yang yang berulang atau bernilai ganda
   3. Telah ditentukannya *primary key* untuk table /relasi tersebut
   4. Tiap attribute hanya memiliki satu pengertian

C. Bentuk normal ke dua *(Second Normal Form/*2NF*)*
   Bentuk normal kedua didasari atas konsep *fullfunctional dependency* (ketergantungan fungsional sepenuhnya).
   Syarat normal kedua (2-NF)
   1. Bentuk data telah memenuhi criteria bentuk normal kesatu.
   2. Atribut bukan kunci (*Non-Key)* harus memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya (*fully functiona dependency*) pada kunci utama/*primary key.*

D. Bentuk Normal Ketiga (*Trird Normal/3* NF)
Syarat normal ketiga:
1. Bentuk data telah memenuhi data kedua
2. Atribut bukan kunci haruslah tidak memiliki ketergantungan fungsional terhadap atribut bukan kunci lainnya, seluruh atribut bukan kunci pada suatu relasi hanya memiliki ketergantungan fungsional terhadap *primary key* direlasi itu saja.

E. *Boyce-Codd Normal Form* (BCNF)
*Boyce-Codd Normal*didasari pada beberapa ketergantungan fungsional *(functional dependencies)* dalam suatu relasi yang melibatkan seluruh *candidate key* di dalam relasi tersebut.

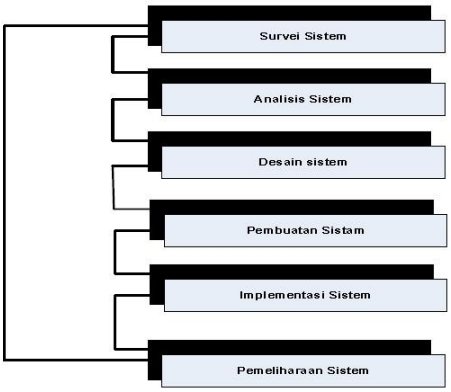
2.3 Pengembangan *Software* Aplikasi

2.3.1Model Pengembangan Sistem

Model pengembangan sistem yang penulis pakai adalah *iterasi*, pengertian *iterasi* dalam buku yang berjudul *Analisa Sistem Informasi*, menjekaskan bahwa:

> Model pengembangan sistem adalah tahapan-tahapan tersebut dilaksanakan dengan pemakai teknik iterasi atau dimana suatu proses dilaksanakan secara berulang-ulang sampai didapatkan hasil yang diinginkan. (Tata Sutarbi, 2004, h.62)

Sistem dari Model Pengembangan Sistem *Iterasi* sebagai berikut:



Gambar 2.4 Model Pengembangan *Iterasi* (Tata Sutarbi, 2004, h.63)

Alasan penulis menggunakan model pengembangan *iterasi* dalam pengembangan sistem ini dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas dalam menganalisis suatu data mengakibatkan penulis melakukan tahapan pengembangan sistem dengan berulang-ulang sampai hasil yang didapat benar-benar terpenuhi dengan maksud menjadikan produk yang dihasilkan merupakan produk yang relevan bagi instansi/perusahaan yang penulis teliti.

2.3.2 Diagram Relasi Entitas

Definisi *Entity Relationship Diagram* (ERD) dalam bukunya yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi* adalah sebagai berikut: "*Entity Relationship Diagram* (ERD) adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak."(Al-Bahra,2005, h.142)

Definisi lain definisi *Entity Relationship Diagram* (ERD) dalam bukunya yang berjudul *Basis Data* adalah sebagai berikut:

> Model *Entity Relationship* yang berisi komponen-komponen himpunan entitas dan himpunan relasi yang masing-masing dilengkapi dengan atribut-atribut yang mempresentasikan seluruh fakta dari dunia nyata yang kita tinjau, dapat digambarkan dengan lebih sistematis dengan menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD).(Fathansya, 2004, h.79)

Berdasarkan definisi-definisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ERD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang tersimpan secara sistem atau teknik menggambar suatu skema database dimana setiap komponen yang terlibat dalam ERD memiliki atribut masing-masing yang mempresentasikan fakta dari dunia nyata dan sedang ditinjau.

A. Derajat Relationship *(Relationship Degree)*

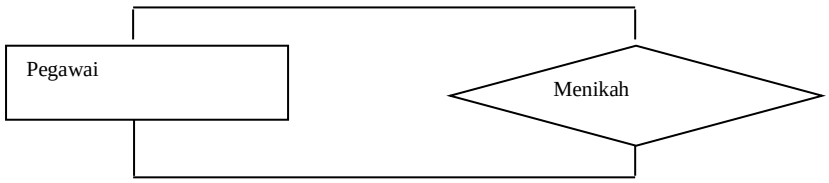
Definisi Derajat Relationsip dalam bukunya yang berjudul *Konsep Sistem Basis Data dan Implementasinya* menyatakan bahwa: "*Relationship Degree* adalah jumlah entitas yang berpartisipasi dalam satu *relationship*."(Al-Bahra, 2005, h.144)

B. Derajat *Relationship* yang sering digunakan dalam ERD sebagai berikut:

1. *Unary Relationship*

*Unary Relationship*dalam bukunyaadalah model *relationship* yang terjadi antara entity yang berasal dari *entity set* yang sama.

Contoh :



Gambar 2.5 Diagram *Relationship Unary* (Lajamudin, 2005, h.145)

2. *Binary Relationsip*

Definisi *Binary Relationsip* dalam bukunya adalah model *relationship* antara *instance-instanse* dari suatu tipe entitas (dua *entity* yang berasal dari *entity entity* yang sama). *Relationship* ini paling umum digunakan dalam pembuatan model data.

Contoh :

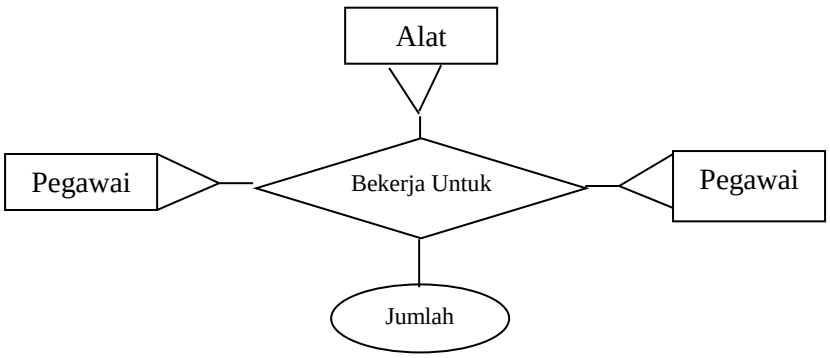


Gambar 2.6 Diagram *Relationship Binary* (Lajamudin, 2005, h.145)

3. *Ternary Relationship*

Definisi *Binary Relationsip* dalam bukunya adalah *Ternary Relationship* antara *instance-intance* dari tiga tipe entitas secara serentak.

Contoh:



Gambar 2.7 Diagram *Ternary Relationship* (Lajamudin, 2005, h.146)

4. Kardinalitas Relasi

Definisi Kardinalitas relasi dalam buku yang berjudul *Konsep Sistem Basis Data dan Implementasi* adalah sebagai berikut: "Kardinalitas relasi menunjukan jumlah maksimum *tupel* yang dapat berelasi dengan entitas pada entitas yang lain."(Al-Bahra, 2005, h.147)

Terdapat 3 macam Kardinalitas relasi menurut Lajamudin yaitu sebagai berikut:

1. Relasi satu ke satu (*One to One*)

   Tingkat hubungan ini menunjukan hubungan satu ke satu, dinyatakan dengan satu kejadian pada entitas pertama, dan hanyan mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas yang kedua dan sebaliknya.

   Contoh :



Gambar 2.8*One to One* (Lajamudin, 2005, h.149)

2. Relasi satu ke Banyak (*One to Many* atau *Many to One*)

   Tingkat hubungan satu ke banyak adalah sama dengan banyak ke satu, tergantung dari mana hubungan arah tersebut dilihat. Untuk satu kejadian pada entitas yang pertama dapat mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas yang kedua. Sebaliknya, satu kejadian pada entitas yang kedua hanya dapat mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas yang pertama.

   Contoh:

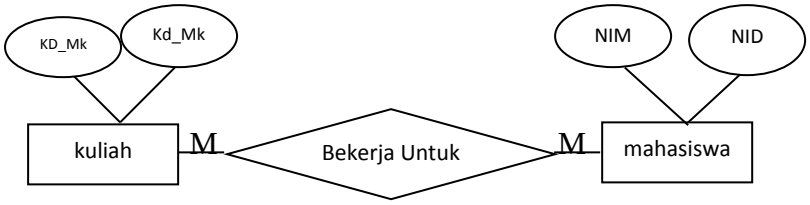


Gambar 2.9*One to Many* (Lajamudin, 2005, h.150)

3. Relasi banyak ke banyak (*Many to Many*)

   Tingkat hubungan banyak ke banyak terjadi tiap kejadian pada sebuah entitas akan mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas lainnya, dilihat dari sisi entitas yang pertama maupun dilihat dari sisi yang kedua.

   Contoh:



Gambar 2.10*Many to Many* (Lajamudin, 2005, h.155)

2.3.3*Software*

Definisi *software* dalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Manajemen*, menjelaskan bahwa: "*Software* adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada computer." (Susanto, 2007, h.166)

Definisi lain dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hardware-Software dan Pengelolaan Instansi Komputer*, menjelaskan bahwa: "perangkat lunak berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja computer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem computer." (Daulay S, 2007, h.22)

Berdasarkan definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *software* adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja dari computer.

2.3.2*Software* Aplikasi

Definisi *software*dalam buku yang berjudul *Mengenal Hardware-Software dan Pengelolaan instalasi komputer* mendefinisikan *software* sebagai berikut "perangkat lunak berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer dan semua instruksi yang mengarah pada sistem komputer". (Melwin Syafrizal, 2007, h.22)

Definisi lain dalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi*, menjelaskan bahwa:"*software*adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjelaskan aplikasi tertentu pada komputer, sedangkan program merupakan kumpulan dari perintah-perintah komputer yang tersusun secara sistematis."(Susanto, 2008, h. 234)

Berdasarkan definisi-definisi diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa *software* adalah kumpulan program-program yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas kerja komputer yangmengarah pada sistem komputer.

1.3.3 *Crystal Report*

Definisi *Crystal Report* dalam bukunya yang berjudul *Visual Basic 6.0 dengan Crystal Report* menjelaskan bahwa: "*Crystal Report* merupakan program khusus untuk membuat laporan yang terpisah dengan program *Microsoft Visual Basic 6.0,* tapi keduanya dapat dihubungkan (di link-an)." (Madcom, 2003, h.40)

Definisi lain dalam bukunya yang berjudul dalam bukunya yang berjudul *Membangun Sistem Informasi Akuntansi* dengan *VB* dan *SQLServer* menjelaskan bahwa: "*Crystal Report* merupakan program yang dapat digunakan untuk membuat, menganalisis dan menterjemahkan informasi yang terkandung dalam

database/program kedalam berbagai jenis laporan yang sangat fleksibel.'' (Kusrini dan Andri Kuniyo, 2007, h.264)

Berdasarkan Definisi-definisi diatas penulis dapat mmenyimpulkan bahwa *Crystal Report* merupakan sebuah program yang digunakan untuk membuat laporan dari suatu sistem menjadi informasi untuk perusahaan.